

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Makassar
Pada Hari Selasa, 20 Januari 2026

Top Management,

**Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005**

Sekretaris Tim Survei,

Ketua Tim Survey,

**NURIYA AWAD, S.H.
NIP. 197503302000032002**

**DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H.
NIP. 197107211999032003**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN IV TAHUN 2025.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Januari 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan dan Sasaran.....	6
C. Prinsip	6
D. Pelaksanaan	7
E. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN	8
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	10
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Rekomendasi.....	13
RUJUKAN:.....	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat yang yangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Transparan

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

4. Berkesinambungan

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa mebedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental

6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2025.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.
2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website :
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 42 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **97,86% atau pada nilai 3,91**.

Hasil IPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Hasil
Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata- rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,905
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,881
U3	Menjual Pengaruh	3,929
U4	Transaksi Biaya	3,881
U5	Biaya Tambahan	3,929
U6	Hadiah	3,929
U7	Transparansi Biaya	3,905
U8	Percaloan	3,929
U9	Perbuatan Curang	3,929
U10	Transaksi Rahasia	3,929
	Total	39,14
	Rata Rata	3,91

Berikut ini 3 unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III TAHUN 2025.

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Penyalahgunaan Jabatan (U2)	3,881	163
2	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,881	163
3	Indikator Transparansi Biaya (U7)	3,905	164

Adapun Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN IV TAHUN 2025 akan disajikan pada Bab 3.

BAB III
RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Tahun 2026			Tahun 2026			Penanggungjawab
			Bln. Jan	Bln. Feb	Bln. Mar	Bln. Apr	Bln. Mei	Bln. Jun	
1	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (U2)	Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada para petugas PTSP agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panitera dan Sekretaris
2	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? (U4)	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna layanan mengenai tarif/biaya di Pengadilan Negeri Makassar.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panitera dan Sekretaris
3	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di	Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada seluruh petugas PTSP agar dalam memberikan pelayanan agar berpedoman pada SOP yang berlaku.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Panitera dan Sekretaris

	Pengadilan dilakukan? (U7)								
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, isimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **3,91** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,905**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,881**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,929**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,881**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,929**;
6. Indikator Hadiyah, mendapat indeks **3,929**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,905**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,929**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,929**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,929**;

Berikut ini 3 (tiga) unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Penyalahgunaan Jabatan (U2)	3,881	163
2	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,881	163
3	Indikator Transparansi Biaya (U7)	3,905	164

Kesan dan Pesan Responden:

No.	Nama	Pekerjaan	Kesan dan Pesan
1	Arin	Lainnya	Kesan : Kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Makassar sudah memiliki sistem Pelayanan yang baik, Petugas melayani dengan cepat, ramah dan komunikatif serta sistem Pelayanan yang canggih, modern, dan transparan. Pesan : Agar kiranya PN. Mks tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas Pelayanan yang efektif, efisien, dan tetap ramah kepada para pengunjung.
2	Sutriyono	Lainnya	Kesan : 1. Seluruh staf memberikan pelayanan yang luar biasa, ramah, dan penjelasan mudah dipahami 2. Senyum, sapa, salam memberikan kesan positif. Pesan : 1. mungkin bisa memberikan penambahan ruang tempat duduk serta tempat fast charge hp pada ruang sidang di belakang (lobby) belakang.
3	Muh. Iqbal Yusuf, SH.	Lainnya	Pelayanan seluruh petugas sudah sangat baik, sistem yang berjalan saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar TRIWULAN IV TAHUN 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **majoritas indikator**

memiliki indeks di atas 3,3 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Hadiah. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keidilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden

1 Data Responden
Nama serta detail responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
Mohon isi kesan dan pesan Anda

Data Responden SPAK

Nama
boleh initials atau tidak disi..

Umur / Jenis Kelamin *
Pilih Jenis Kelamin

Nomor HP *
+62

Domicili *
Pilih Wilayah

Pendidikan *
Pilih Pendidikan

Pekerjaan *
Pilih Pekerjaan

Kembali **Selanjutnya**

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden
Nama serta detail responden

2 Layanan
Layanan

3 Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
Mohon isi kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *
Pilih Layanan Yang Didapat

Pernah Menerima Layanan Ini
Pilih Layanan Yang Didapat

Sebelumnya ? *

Kembali **Selanjutnya**

LOGIN

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

[Beranda](#) [Statistik](#) [Kontak Kami](#) [LOGIN](#)

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Beranda · SPAK · Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1. Data Responden
Nama serta detail responden

2. Layanan
Layanan

3. Form Kuesioner
Ingin form kuesioner SPAK

4. Kesan & pesan
Mohon isi kesan dan pesan Anda

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 Tidak Sesuai Prosedur
 Jarang Sesuai Prosedur
 Sering Sesuai Prosedur
 Selalu Sesuai Prosedur

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
 Petugas melayani selalu meminta imbalan
 Petugas melayani sering meminta imbalan
 Petugas melayani jarang meminta imbalan
 Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Pantera / Staff Pengadilan di luar persidangan ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

[Kembali](#) [Selanjutnya](#)

The screenshot displays the 'APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK' application interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Login' button, a 'Beranda' link, and a 'SPAK' link. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK'.

The main content area contains a survey form for 'Survey Persepsi Anti Korupsi' with the following sections:

- Data Responden:** A section for entering respondent information, including a placeholder 'Nama serta detail responden'.
- Layanan:** A section for selecting service types, with a placeholder 'Nama layanan'.
- Form Kuesioner:** A section for completing the survey questionnaire, with a placeholder 'Isikan form kuesioner SPAK'.
- Kesan & pesan:** A section for leaving feedback and messages, with a placeholder 'mohon isi keean dan pesan Anda'.

At the bottom of the form, there is a note: 'Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami di sini...'.

Below the form, there is a note: 'Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.'

At the bottom right of the form, there is a checkbox labeled 'Saya bukan robot' and a reCAPTCHA verification box. A large green 'Simpan Data' button is located at the bottom right of the form area.

On the right side of the application, there are two buttons: 'Kembali' and 'Selanjutnya'.

1/8/26, 3:19 PM

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR

SULAWESI SELATAN

<http://www.pn-makassar.go.id/>**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**NILAI INDEKS****3,91 / 97,86%**

Jumlah	42 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 31 PEREMPUAN : 11
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 1 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 32 SMU : 2 S2 : 2 Diploma 1 : 4 S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 3 SWASTA : 7 TNI : 0 WIRASAHA : 2 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 30

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan	3,881
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,881
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,905

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

8 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri

-25-

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR